



Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Demokratisasi dalam Masyarakat Indonesia

Azka Akmalul Birri, Yusnita Dwi Ferawati, Ahmad Rifa'i

Universitas Peradaban

Jl. Raya Pagojengan Km.3 Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes
azkabirrii123@gmail.com, yyusnitaf1@gmail.com

Kata kunci

Sistem
Pemerintah,
Demokratisasi,
Demokratisasi
Masyarakat

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi, masyarakat ikut andil dalam politik pemerintahan Indonesia, hal inilah yang disebut demokrasi. Masyarakat dapat menyuarakan seluruh aspirasinya kepada sistem politik lewat DPR atau dewan perwakilan Rakyat, atau rakyat dapat mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan dengan menyamaratakan hak dan kewajiban antar masyarakat yang lain. Metode yang digunakan deskriptif pendekatan kualitatif. Artikel ini menjelaskan pengertian sistem pemerintahan demokrasi dan demokratis, menjelaskan juga mengenai proses demokrasi dan demokratisasi, sebagian kesimpulan artikel ini menjelaskan demokratisasi di Indonesia masih menuju proses yang masih panjang dan perlu dibenahi.

Keywords

Government
System,
Democratization,
Democratization
of Society

Abstract

Indonesia is a democratic country, the people take part in Indonesian governance politics, this is what is called democracy. The community can voice all their aspirations to the political system through the DPR or the people's representative council, or the people can take part in community and state activities by equalizing rights and obligations among other communities. The method used is descriptive qualitative approach. This article explains the meaning of democratic and democratic governance systems, also explains the process of democracy and democratization, some of the conclusions of this article explain that democratization in Indonesia is still going through a long process and needs to be fixed.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan arah negara. Konsep demokrasi telah menjadi pijakan utama dalam banyak negara di seluruh dunia, di mana pemerintahan yang demokratis bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan partisipatif. Menurut (Lechmanan, 1989) demokrasi merupakan metode politik, warga negara diberikan kesempatan untuk memilih dengan sistem yang ditetapkan dengan memberikan suaranya kepada salah satu pemimpin - pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Latar belakang arus demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat dapat ditelusuri ke sejarah perkembangan politik dan sosial. Pada awalnya, kekuasaan politik banyak terpusat pada kelompok elit atau penguasa monarki yang tidak memperhatikan partisipasi rakyat. Namun, seiring perubahan zaman dan tuntutan masyarakat akan keadilan dan keterlibatan, arus demokrasi mulai muncul. Menurut Pratiwi (2019) demokratisasi adalah proses di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam transformasi politik dan sosial untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis. Proses ini melibatkan upaya untuk menghapuskan ketidakadilan, penindasan, dan pembatasan hak asasi manusia, serta membangun institusi dan mekanisme yang memfasilitasi partisipasi publik.

Demokratisasi merupakan isu global dalam tema sentral isu dalam perubahan ekonomi politik, berbagai persoalan yang saling terkait yang menjadi satu objek studi yang cukup luas, ada yang mendekati dengan pendekatan atau masalah nilai kebudayaan (Almond, 1984). Arus demokrasi mencerminkan pergeseran paradigma pemerintahan yang terjadi seiring dengan tuntutan masyarakat akan hak-hak dasar, keadilan, dan keterlibatan dalam pembangunan negara. Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki akses yang setara terhadap kekuasaan politik, serta hak untuk mengungkapkan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. arus demokratisasi juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola publik dan menciptakan institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui demokratisasi, masyarakat diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak mereka, memperkuat partisipasi masyarakat sipil, dan mempromosikan keberagaman dan inklusi dalam pengambilan keputusan politik. Karena sejatinya, demokratisasi dan hak-hak masyarakat dalam politik, sosial dan ekonomi adalah suatu hal yang tidak boleh dikendalikan pemerintah dan justru seharusnya memberikan peluang terwujudnya otonomi swasta, pasar yang mengatur dirinya sendiri (Mayer, 2005). Dengan kondisi yang bisa menjamin setiap warga negaranya, bebas dalam penggunaan kekuatan politik dengan menguasai lembaga negara. (McQuail, 2002)

Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hendaknya mengacu pada akar

budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan kepentingan umum. Namun budaya individualisme dan budaya liberal yang masuk melanda masyarakat dengan melalui arus globalisasi tidak dapat dibendung karena kemajuan teknologi.

Sistem politik demokratis adalah sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok pada lembaga pemerintahan, baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam hak dan kemampuan masing-masing untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata baik lisan maupun tulisan Endraswara (2013) penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan kedalaman penelitian terhadap interaksi antar konsep yang dengan dikaji secara empiris. Dalam penelitian kualitatif deskriptif tentunya memiliki ciri-ciri diantaranya adalah (1) penelitian mengharuskan peneliti untuk membaca secara cermat karena merupakan kunci dari sebuah penelitian kualitatif (2) Penelitian harus dilakukan secara deskriptif artinya berbentuk kata-kata atau gambar yang diperlukan (3) dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan proses ketimbang hasil (4) Makna merupakan andalan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan menuju demokratisasi tidak selalu mulus. Masyarakat sering dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam menghadirkan demokrasi yang sejati. Beberapa faktor seperti ketimpangan kekuasaan, ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan intervensi eksternal dapat mempengaruhi kemajuan demokratisasi. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Menurut Agustino (2017) demokratisasi Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik, tidak mengedepankan tatanan politik, lalu masyarakat cenderung tidak aktif dalam demokratisasi karena kekacauan atau permainan dari pemegang kekuasaan itu sendiri, beberapa contoh kasus dapat memberikan jawaban dari hipotesis tersebut

Arus demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat memiliki beberapa tujuan utama menurut Mahfud (2010) arus demokrasi memiliki beberapa tujuan Pertama, menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat. Kedua, mempromosikan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia yang mendasar. Ketiga, memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, konsultasi, atau mekanisme partisipasi lainnya. Keempat, membangun institusi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Berikut ini beberapa contoh kasus yang menjadi gambaran sistem demokrasi yaitu

1. KPU yang sering tidak melaksanakan tugasnya dengan benar

KPU tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Alasan yang sering muncul adalah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang

diselenggarakan KPU. Dari waktu ke waktu, seringkali muncul kasus-kasus kecurangan seperti adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetapi sudah meninggal, pemilih ganda, atau adanya pemilih yang memilih di luar daerah tempat mereka terdaftar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas KPU dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, KPU seringkali tidak mampu mengelola logistik pemilihan umum dengan baik. Salah satu contoh yang terjadi adalah terlambatnya pengiriman surat suara ke tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini mengakibatkan sebagian pemilih harus menunggu lama untuk dapat menggunakan hak pilih mereka. Kejadian-kejadian seperti ini mengganggu kredibilitas KPU dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, KPU juga kerap kali menghadapi masalah teknis dalam sistem perhitungan suara. Pada pemilihan umum sebelumnya, terdapat laporan bahwa sistem penghitungan yang digunakan oleh KPU mengalami kegagalan atau kerap kali mengalami kesalahan. Ini menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan KPU dalam melaksanakan tugasnya dengan benar. Alasan lain mengapa KPU tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik adalah beban kerja yang terlalu tinggi bagi anggotanya.

KPU terdiri dari anggota yang jumlahnya terbatas, namun harus melaksanakan tugas pemilihan umum yang melibatkan jutaan pemilih. Terkadang, hal ini mengakibatkan KPU terkesan tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada pemilih. Terakhir, kurangnya komunikasi dan transparansi dari KPU juga menyebabkan publik meragukan kinerja mereka. Informasi yang diberikan oleh KPU mengenai proses pemilihan umum seringkali tidak mencukupi atau terkesan kabur. Hal ini meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya secara benar.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting bagi KPU untuk memperbaiki diri agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. KPU perlu meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan dalam pemilihan umum, mengelola logistik dengan lebih efisien, memperbaiki sistem teknis perhitungan suara, meningkatkan koordinasi antaranggota KPU, serta memperbaiki komunikasi dan transparansi kepada publik. Hanya dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini, KPU dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang adil dan transparan.

2. Anggota Legislatif Yang Tidak Amanah

Anggota legislatif adalah adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, banyak anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi, seperti menerima suap atau memanfaatkan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Banyak anggota legislatif yang melanggar janji-janji kampanye mereka setelah terpilih. Mereka seringkali mengubah sikap dan pandangan politiknya seiring dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pola pikir dan integritas para anggota legislatif. Seringkali banyak anggota legislatif yang absen atau tidak aktif saat sidang parlemen.

Mereka tidak hadir saat voting atau bahkan tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi isu dan kebijakan yang sedang dibahas. Sikap seperti ini mencerminkan ketidakseriusan dan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab

mereka sebagai wakil rakyat. Terlepas dari ketidak amanahan individu, sistem partai politik juga memiliki andil dalam masalah ini. Banyak anggota legislatif yang lebih mempertahankan kepentingan partai daripada mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Mereka terjebak dalam aliran kekuasaan partai dan agresif dalam membela apa yang dianggap sebagai kepentingan partai. Situasi ini menempatkan mereka di luar kendali dan akuntabilitas langsung kepada pemilih. Selain itu, bisa juga terlihat anggota legislatif tidak mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Kode etik ini dirancang untuk menjaga integritas dan moralitas anggota ketika melaksanakan tugasnya. Namun, masih saja terdapat kasus-kasus pelanggaran kode etik, baik dalam bentuk korupsi, tindak kekerasan, atau perilaku tidak pantas lainnya. Untuk mengatasi ketidak amanahan anggota legislatif langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya. Laporan keuangan dan aktivitas sehari-hari mereka harus dapat diakses oleh publik agar dapat dilakukan pemantauan yang lebih efektif;
- b. Partai politik harus lebih selektif dalam merekrut dan memberi pelatihan kepada calon anggota legislatif. Proses seleksi yang lebih ketat dan pelatihan yang intensif dapat memberikan jaminan bahwa anggota legislatif terpilih lebih dapat diandalkan;
- c. Masyarakat dan media massa memainkan peran penting dalam mengekspos dan memantau perilaku dan kinerja anggota legislatif. Dengan adanya lebih banyak investigasi jurnalisme dan aduan publik, anggota legislatif harus mempertimbangkan risiko dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugasnya.

Demokrasi yang sehat, kepercayaan publik adalah kunci untuk kesuksesan lembaga legislatif. Oleh karena itu, memperbaiki amanah anggota legislatif adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan pemerintahan negara. Dalam konteks global saat ini, penting bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan memperkuat proses demokratisasi. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kaum muda, perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat sipil, arus demokrasi dapat menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Arus demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat merupakan topik yang penting dan relevan dalam konteks perkembangan politik dan sosial di banyak negara di seluruh dunia. Demokrasi menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk memiliki kebebasan, keadilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi publik, dan perlunya memperjuangkan keadilan sosial.

Masyarakat harus diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Di samping itu, peran kaum muda, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil juga penting dalam memperkuat arus demokrasi dan demokratisasi. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan penghapusan ketimpangan dalam masyarakat.

PENUTUP

Arus demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan perjuangan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mempromosikan partisipasi publik, dan mengatasi tantangan yang menghambat kemajuan demokratisasi. Dengan membangun kesadaran, pendidikan politik, dan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat, kita dapat mewujudkan arus demokrasi yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2017. Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Almond, G. S. (1984). Budaya politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina aksara.
- Lechman, David, 1989, Democracy and Development in Latin America, Cambridge: Polity Press.
- Mahfud, MD. 2010. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Meyer. T., 2005. Demokrasi Sosial dan Libertarian. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung.
- McQuail, Denis. McQuail's. Mass Communication Theory. Third Edition. London: SAGE Publications, 2002

